BAB IV

Implikasi Bantuan USAID Terhadap Ketergantungan Indonesia Atas Amerika Serikat

Dalam bab ini akan memaparkan implikasi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat yang diprakarsai oleh pemberian bantuan luar negeri melalui USAID. Serta menjelaskan implikasi tersebut dari berbagai sektor, seperti implikasi bagi perekonomian, politik, serta kedaulatan Indonesia dalam mengambil keputusan yang ditenggarai oleh dominasi asing.

A. Implikasi Hegemoni AS terhadap perekonomian Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga

USAID merupakan lembaga internasional yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengurusi pemberian bantuan luar negeri khususnya kepada negara dunia ketiga. Tentunya setelah dianalisa akan ditemukan bukti ekspansi Amerika Serikat sebagai negara pendonor, di negara penerima donor. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat ini dapat dikatakan sebagai instrument hegemoni terhadap pembangunan negara dunia ketiga. Dalam setiap penerimaan bantuan luar negeri oleh negara dunia ketiga, terdapat kepentingan serta pengaruh atas negara dunia ketiga tersebut. Ekspansi asing Amerika Serikat sebagai negara pemberi bantuan luar negeri melalui USAID di sektor ekonomi adalah kebijakan privatisasi. Berikut adalah bukti dari negara-negara dunia ketiga yang mengalami ekspansi asing pada sektor ekonominya melalui kebijakan privatisasi.

I. Kebijakan Privatisasi di negara dunia ketiga

Privatisasi sering dikatakan sebagai suatu cara untuk memperbaiki kinerja BUMN, [illegible] perekonomian, serta menambah pemasukan keuangan di

negara tersebut. Privatisasi BUMN yang banyak diterapkan oleh negara berkembang kerap menimbulkan kontroversi yang terkait dengan tujuan, motivasi, serta penerapan nya. Privatisasi kerap dilakukan oleh negara dunia ketiga dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja BUMN.

Namun Peningkatan kinerja BUMN tidak saja terjadi karena perpindahan transfer kepemilikan dari pemerintah ke sektor swasta, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana lingkungan politik yang kondusif, faktor organisasi yang memungkinkan tumbuhnya semangat corporate entrepreneurship, serta faktor kebijakan untuk mendukung tumbuhnya industri yang sehat[66]. Di negara berkembang proses privatisasi tidak selamanya berhasil untuk meningkatkan kinerja BUMN, karena biasanya terselip motivasi politik yang lebih kuat dibanding keinginan untuk menyehatkan BUMN itu sendiri. Political motivation itu biasanya terkait dengan politik redistribusi kesejahteraan yang ditujukan hanya kepada kelompok tertentu saja[67].

Alasan Privatisasi yang dilakukan oleh negara berkembang selain demi peningkatan kinerja BUMN adalah, faktor ideologi. Faktor ideologi ini dibawa oleh negara eropa. Kemudian biasanya negara eropa ini akan memberikan beasiswa bagi masyarakat sipil di negara berkembang untuk bersekolah ke negerinya. Sehingga ideologi negara eropa ini mempengaruhi masyarakat sipil yang sedang belajar, dan ketika mereka kembali ke negara asal, mereka akan menjadi lulusan berpendidikan yang akan terbawa arus ideologi kaum eropa, dan menjalankan privatisasi di negara asalnya.

66- [illegible] "Faktor-faktor [illegible] mempengaruhi keberhasilan privatisasi BUMN". Bahan research day

Selain itu keberadaan organisasi donor internasional seperti USAID, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan IFC semakin memperkuat promosi privatisasi untuk diberlakukan di negara berkembang dengan maksud untuk meningkatkan daya saing ekonomi di negara berkembang. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh organisasi donor internasional, maupun pinjaman luar negeri yang dipinjamkan oleh lembaga seperti IMF menjadikan privatisasi sebagai bagian dari komitmen hutang yang diberikan. Selain itu alasan privatisasi dilakukan di negara berkembang adalah demi menjalankan kelompok politik tertentu di suatu negara. Contohnya di negara maju seperti Inggris, privatisasi digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan pemilu. Di negara berkembang seperti asia dan amerika latin, privatisasi digunakan untuk memperkaya kelompok ekonomi dan politik tersebut[68].

Program privatisasi merupakan program utama USAID bagi negara dunia ketiga. Pada tahun 1981, USAID memperkenalkan sebuah program yang disebut dengan inisiatip perusahaan swasta (Private Enterprises Initiative=PEI) yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara sedang berkembang[69]. Program USAID ini dimaksudkan untuk memajukan stabilitas ekonomi dan politik, dimana AS mempunyai kepentingan bagi kebijakan politik keamanan luar negerinya. Selain itu program kedua USAID adalah Economic Support Fund, dimana bentuk bantuan ESF ini menyediakan cash transfer dan finansial bagi impor komoditi atau bantuan proyek yang terdiri dari pengembangan modal dan bantuan teknis.

ESF ini sering digunakan USAID untuk mempengaruhi pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan ekonomi di negara sedang berkembang, terutama

[68] Ibid hal 9

dalam pengimplementasian privatisasi di negara sedang berkembang . Berikut contoh implementasi kebijakan privatisasi BUMN di beberapa negara sedang berkembang[70].

Tabel 4.1

Daftar Kebijakan Privatisasi BUMN di negara dunia ketiga

Negara	Campur tangan USAID	Kebijakan Privatisasi
Bangladesh	USAID mendampingi program privatisasi pertanian pemerintah Bangladesh.	Distribusi fertilizer seluruhnya telah dikontrol oleh pasar bebas
Costa Rica	Membuat program ESF (Economic Support Fund) untuk membangkitkan mata uang lokal yang digunakan dalam penjualan BUMN Costa Rica	42 perusahaan BUMN telah di privatisasi
Gambhia	Mendorong efisiensi dan produktivitas produk pertanian	Menjual saham Gambia Produce Marketing Board
Ghana	Memprivatisasi Impor dan distribusi fertilizer	Subsidi harga fertilizer dikurangkan
Honduras	Pemberian bantuan teknis kepada perusahaan BUMN di Honduras	Privatisasi terhadap 8 perusahaan
Jamaica	Menerapkan program ESF untuk privatisasi BUMN milik Jamaica	Pemerintah Jamaica telah menyetujui privatisasi 39 perusahaan
Malawi	USAID memberikan bantuan teknis melalui perusahaan AS yaitu Delloite Haskin & Sells.	Pemerintah Malawi memprivatisasi Perusahaan pertaniannya yaitu (Admarc)
Mali	USAID menjalankan program Economic Policy Programme untuk mereformasi lingkungan bisnis agar kondusif melakukan privatisasi	Pengkontrolan harga pada beberapa jenis barang dan pemberlakuan aturan komersil baru
Senegal	USAID dengan program ESF (Economic Support Fund) menerapkan pemakaian mata uang lokal untuk liberalisasi pasar di Senegal	75% distribusi fertilizer berada di tangan swasta, subsidi perusahaan minyak kacang tanah telah dihilangkan.

Dari paparan tabel diatas, kita dapat melihat bagaimana campur tangan USAID kepada kebijakan privatisasi di Negara Dunia Ketiga, hal ini menunjukkan, bahwa di setiap pemberian bantuan luar negeri yang didonorkan melalui USAID, tersembunyi motif politik maupun ekonomi terhadap negara penerima donor. Kebijakan privatisasi yang diberlakukan oleh setiap negara, tentunya memberikan dampak yang berbeda-beda bagi negara tersebut. Privatisasi yang di promosikan dan diterapkan oleh USAID, kerap dikatakan memiliki tujuan untuk mereformasi dan mestabilkan perekonomian negara itu, serta meningkatkan efisiensi BUMN Namun

tidak semua nya kebijakan privatisasi yang di terapkan oleh USAID berdampak positif kepada ekonomi negara dunia ketiga tersebut.

Contoh kuat nya yaitu penerapan privatisasi di negara Gambhia, USAID berusaha mendorong efisiensi dan produktivitas proses serta pemasaran produk pertanian negara Gambhia ini. Dengan menerapkan program tersebut USAID mempengaruhi pemerintah Gambhia untuk menjual atau melepaskan saham serta memprivatisasi perusahaan produksi pertanian serta hasil pertanian Gambhia . Namun hal ini mempengaruhi kelancaran pangan di Gambhia. Dari kasus negara Gambhia ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua privatisasi dapat diimplementasikan ke setiap negara dunia ketiga. Karena kondisi internal setiap negara dunia ketiga berbeda-beda. Namun hal ini sepertinya tidak dihiraukan oleh USAID. Karena USAID lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi milik Amerika Serikat, untuk menyebarkan dan menerapkan ekonomi yang cenderung bersifat neoliberal di negara dunia ketiga. Resikonya adalah, ketika di suatu negara mengimplementasikan ekonomi yang bersifat neoliberal, maka hal ini akan cenderung menjadikan negara tersebut bergantung dengan negara maju. Sehingga berimbas terhadap pembangunan internal negara dunia ketiga tersebut.Analisa ini juga berlaku terhadap Indonesia. Campur tangan USAID terhadap rumusan kebijakan baik di sektor ekonomi maupun politik di Indonesia, berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi serta situasi politik Indonesia.

II. Implikasi Ketergantungan Ekonomi Indonesia terhadap AS akibat Pemberian Bantuan Luar Negeri USAID.

Amerika Serikat menggambarkan dirinya sebagai negara super power dan

bahwa sebagai negara super power dan memiliki kuasa Amerika Serikat mempunyai kepentingan ekonomi di seluruh dunia yaitu dengan mengekspansi kebijakan di negara dunia ketiga serta mengimplementasikannya demi memenuhi kepentingan Amerika Serikat tersebut. Contohnya seperti perdagangan bebas yang memberikan perusahaan-perusahaan multinasional dan para pemilik modal mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap pasar dan sumber daya dunia. Amerika Serikat menggunakan jalan politik, militer, dan ekonomi, termasuk bantuan luar negeri, untuk mencapai tujuannya.

Sebagai salah satu negara penerima bantuan luar negeri, alhasil dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi bergantung kepada negara pendonor bantuan luar negeri tersebut. Berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh negara pendonor tersebut menjadi dasar dari sebuah rantai ketergantungan baik dari segi ekonomi, politik, maupun kedaulatan negara ini. USAID merupakan lembaga internasional milik Amerika Serikat yang mengurusi penyaluran bantuan luar negeri kepada negara dunia ketiga.USAID banyak berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia dari berbagai sektor, baik memperbaiki kualitas pendidikan, membangun tata pemerintahan yang lebih baik, serta mereformasi keseimbangan perekonomian Indonesia.

Dalam setiap program maupun bantuan teknis yang USAID berikan, USAID selalu mempunyai fokus yang menjadi dasar nya terhadap pemberian bantuan luar negeri di sektor tersebut. Dengan kata lain, USAID memiliki motif terselubung dibalik pemberian bantuan luar negeri nya kepada Indonesia. USAID milik Amerika Serikat, oleh karena itu setiap program serta hasil yang diperoleh dari program USAID semata-mata kembali lagi kepada Amerika Serikat. Hal ini lah yang tidak

ketergantungan Indonesia atas Amerika Serikat dari berbagai aspek. Berikut bukti yang memberikan penjelasan akan ketergantungan Indonesia atas Amerika Serikat.

a. Bantuan finansial yang diberikan Amerika Serikat melalui USAID dan IMF

Ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat tidak hanya didasari dari penerimaan bantuan luar negeri yang diberikan melalui USAID.Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Amerika Serikat adalah negara super power yang memiliki keinginan besar untuk mengintervensi negara dunia ketiga baik dari sektor politik maupun ekonomi demi mengambil keuntungan bagi Amerika Serikat. Negara dunia ketiga dibuat masuk ke dalam ketergantungan kepada Amerika Serikat, sehingga mereka dapat dijadikan sebagai sumber material untuk mencukupi kepentingan nasional Amerika Serikat.Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga yang terus diintervensi Amerika Serikat untuk masuk kedalam lingkar ketergantungan Amerika Serikat, karena Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah dan kaya potensi. Ketika Indonesia masuk kedalam ketergantungan ekonomi kepada Amerika Serikat tentunya hal ini akan mempermudah Amerika Serikat untuk mengendalikan kebijakan ekonomi di Indonesia. Jalan dan cara Amerika Serikat untuk mengintervensi Indonesia agar masuk dalam ketergantungan ekonomi kepada Amerika Serikat tidak hanya dengan melalui penyaluran bantuan luar negeri dari USAID, akan tetapi juga melalui pemberian hutang luar negeri kepada Indonesia lewat lembaga internasional milik Amerika Serikat yaitu IMF (International Monetary Fund). IMF mengurusi penyaluran hutang kepada negara-negara yang membutuhkan pinjaman luar negeri

Selain pemberian bantuan luar negeri melalui USAID, Amerika Serikat juga telah mengintervensi ekonomi Indonesia melalui peminjaman hutang luar negeri kepada Indonesia. Hutang luar negeri ini digunakan sebagai sumber dana dan modal bagi pembangungan ekonomi serta infrastruktur di Indonesia, namun pada kenyataannya, hutang luar negeri ini justru menyeret Indonesia kedalam lingkaran ketergantungan terhadap negara pemberi hutang luar negeri tersebut, karena dengan berhutang, Indonesia harus menerapkan syarat yang diberlakukan oleh negara atau lembaga pendonor, dalam hal ini adalah IMF dan Amerika Serikat ke dalam sejumlah kebijakan politik maupun ekonomi Indonesia.

IMF benar-benar paham bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat itu, Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang sedang gencar nya membangun, tentunya sudah mencoba untuk berusaha mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari negara lain. Hal ini pernah dilakukan di masa pemerintahan Soekarno. Akan tetapi Indonesia sulit untuk bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa memperdulikan bangsa lain yang masih giat membangun. Dengan kondisi ini , Indonesia harus mengikuti arus ini, serta membuka diri demi menunjang pembangunan bangsa dari sendi ekonomi nasionalnya.

Setelah merdeka, di masa pemerintahan orde lama, ekonomi Indonesia cenderung bersifat tertutup, karena ideologi Soekarno yang saat itu menjadi pemimpin Indonesia untuk menghindari bantuan atau pinjaman asing, demi menghilangkan intervensi asing di Indonesia. Dalam artian tingkat investasi asing di Indonesia masih rendah, kerja sama luar negeri yang belum fleksibel, sumber daya

masa pemerintahan orde lama Indonesia mewarisi hutang sejumlah, 2,4 Miliar dolar[71].

Dengan kondisi ini kemudian Indonesia berusaha memperbaiki pembangunan ekonominya di masa orde baru, dengan gencarnya melaksanakan pembangunan. Di masa pemerintahan orde baru, Indonesia menjadi lebih terbuka dengan kerjasama dan Investasi asing. Namun hal ini justru lebih menambah akumulasi jumlah hutang Indonesia, karena di masa pemerintahan orde baru, presiden justru lebih mengandalkan peminjaman hutang luar negeri terutama dari Amerika Serikat dan lembaga internasional seperti IMF. Menurut presiden Soeharto, hutang luar negeri ini digunakannya sebagai modal untuk membangun infrastruktur, industri dan lain-lain.[72] Namun pembangunan Indonesia pada masa pemerintahan Orde baru juga tidaklah terlalu bagus.karena ditahun 90 an, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup memberatkan, tentunya ini membuat Indonesia membutuhkan bantuan serta pinjaman dari luar negeri. Dengan kondisi seperti ini, IMF kemudian memberikan bantuan luar negerinya berupa pinjaman kepada Indonesia. Namun IMF memberikan syarat kepada Indonesia dalam letter of intent nya yang terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang seperti menerapkan kebijakan reformasi institusional, pemangkasan belanja kesejahteraan, pengesahan berbagai undang-undang yang pro terhadap penanaman modal asing serta Indonesia harus meningkatkan harga komoditas layanan publik, meningkatkan peranan pasar, menyederhanakan prosedur ekspor, serta peningkatan pengumpulan pajak[73].

[71] "Orla mewarisi, Orba Menambah utang luar negeri", nasional.kompas.com, 2 September 2014
[72] "Kebiasaan mewariskan hutang sejak Soekarno hingga SBY", merdeka.com, 9 Juli 2014
[73]

Dengan adanya syarat yang ditetapkan oleh IMF justru lebih memberatkan Indonesia yang kondisi keuangannya sedang tidak stabil.Ditambah dengan pengelolaan hutang yang tidak tepat sasaran. Di masa orde baru ini, hutang luar negeri ini justru menyuburkan lahan korupsi bagi aparat birokrasi di Indonesia, dan mengakibatkan besarnya potensi korupsi serta penyalahgunaan dana hutang tersebut. Inilah yang menyebabkan hutang Indonesia tidak tepat sasaran atau mengalami kebocoran. Dua lembaga internasional besar seperti IMF dan seharusnya tahu dan dapat mengambil tindakan pencegahan hutang yang disalurkan ke Indonesia yang saat itu telah mengalami kebocoran[74]. Namun kelihatannya, kedua lembaga keuangan internasional ini tidak berbuat sesuatu dan terkesan membiarkan dana yang dituangkan tersebut bocor.

Program serta proyek yang diusulkan dan didanai oleh hutang tersebut juga tidak efisien membangun ekonomi Indonesia. Karena biasanya setiap program atau proyek yang didanai pemberi hutang tersebut mengkhususkan syarat bahwa komponen ataupun kontrak-kontrak pengadaan barang harus berasal dari negara pemberi hutang. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk memutar ulang dana yang diberikan oleh si pemberi hutang tersebut. Departemen keuangan AS mengaku, untuk setiap dollar AS yang di kontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral, perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program pinjaman atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman lembaga-lembaga tersebut[75]. Akhirnya total hutang yang diwariskan pada masa pemerintahan orde baru bernilai 171 miliar dolar[76]

[74] "Dampak positif dan negatif peran bank dunia terhadap dunia internasional, ipb.ac.id, 31 Oktober 2014
[75] ibid
[76] "Presiden baru dilarang berhutang", Jakartagreater.com, 10 Juli 2013

Oleh sebab itu jika dilihat dari sisi keefektifitasnya, secara internal justru hutang luar negeri menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi Indonesia.Juga menjadi penyebab merosotnya kesejahteraan rakyat serta pelopor pembuatan kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat neoliberal[77]. Dan secara eksternal utang luar negeri memicu ketergantungan serta melahirkan rantai hutang pembuatan luar negeri yang tidak putus. Hal ini dibuktikan dengan jumlah hutang luar negeri yang terus bertambah di setiap masa pemerintahan presiden Indonesia, total hutang luar negeri sampai di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejumlah Rp. 2023 triliun[78]. Konsekuensi yang ditimbulkan dari hutang luar negeri ini adalah, syarat yang ditetapkan oleh IMF kepada Indonesia. Pada tahun 1997 saat Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup parah, IMF datang yang kemudian memberikan pinjaman bantuan finansial kepada Indonesia untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu tidak stabil. Namun karena saat itu pengelolaan hutang Indonesia tidak efektif, serta karena banyak nya mengalami kebocoran, hal ini kemudian melahirkan rantai ketergantungan kepada negara donor yang menaungi IMF tersebut. Rantai ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Amerika Serikat ini juga didasari melalui implementasi syarat yang ditetapkan oleh IMF sebagai balasan atas hutang luar negeri yang dipinjamkan oleh IMF kepada Indonesia.

Konsekuensi persyaratan akan transaksi utang luar negeri ini mendorong penguasaan atas faktor-faktor produksi yang penting bagi Indonesia oleh pemodal besar dan investor asing di Indonesia. Selain IMF, dominasi Amerika Serikat diteruskan oleh USAID. Jika IMF mendominasi ekonomi Indonesia melalui hutang luar negeri, maka dengan USAID Amerika Serikat mengintervensi ekonomi

[77] "Malapetaka Utang Luar Negeri", berdikarionline.com, 10 November 2014

Indonesia melalui pemberian bantuan asing baik berupa bentuk uang maupun asistensi program di berbagai sektor. USAID telah memberikan kontribusi bantuan luar negeri kepada Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti bantuan dana. Contohnya seperti di bidang pendidikan Indonesia, USAID telah memberikan bantuan dana sebesar $65 juta dolar kepada Indonesia, dan angka tersebut merupakan sebagian dari total bantuan senilai $700 juta dolar yang USAID berikan kepada Indonesia[79]. Penerimaan bantuan luar negeri ini melalui USAID melahirkan implikasi ketergantungan pada sektor perekonomian Indonesia atas Amerika Serikat. Karena resiko yang diambil atas penerimaan bantuan luar negeri ini adalah, Indonesia harus menerima campur tangan negara donor yang menaungi USAID tersebut, yaitu Amerika Serikat. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, Amerika Serikat mempunyai motif terselubung atas Indonesia, demi mengambil keuntungan sebagai timbal balik atas pemberian bantuan luar negeri yang didonorkan nya kepada Indonesia. Hal ini menciptakan fenomena ketergantungan Indonesia atas Amerika Serikat.

b. Dampak Ekspansi Amerika Serikat melalui USAID dalam mempengaruhi pengelolaan sektor energi di Indonesia.

Kebijakan mengenai minyak dan gas merupakan salah satu kebijakan yang penting bagi suatu negara. Untuk itu seharusnya kebijakan mengenai minyak dan gas harus mengutamakan kepentingan rakyat. Akan tetapi input atau pengaruh dari pihak asing dalam proses pembuatan kebijakan tersebut melencengkan kebijakan dari apa yang seharusnya. Menurut undang-undang 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

[79] [illegible] diri 9 Juli 2005

hidup orang banyak dikuasai oleh negara[80]. Hal ini berarti bahwa pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Akan tetapi karena pengaruh USAID undang-undang ini kemudian berubah menjadi UU NO 22 tahun 2001 yang cenderung menyerahkan pengelolaan minyak dan gas bumi kepada pihak asing[81]. Campur tangan USAID terhadap perubahan undang-undang migas ini terbukti dari adanya kucuran dana yang USAID berikan sejumlah Rp.200 miliar dalam bentuk reformasi sektor energi ke berbagai pihak di Indonesia[82]. Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dari implementasi perubahan undang-undang ini.Akibat perubahan undang-undang ini jumlah pengelolaan minyak dan gas bumi yang dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat semakin meningkat jumlahnya[83]. Total investasi Amerika Serikat pada Indonesia di sektor migas berjumlah US$25 [84].

Akibat adanya liberalisasi undang-undang migas ini, perusahaan minyak milik negara sendiri yaitu pertamina, yang tadinya mempunyai andil yang besar dalam pengelolaan minyak, kini hak nya dalam mengelola energi dan gas di Indonesia menjadi setara dengan perusahaan asing milik Amerika Serikat. Oleh karena itu pertamina juga harus mengikuti tender jika ingin mengelola minyak Indonesia. Konsekuensinya pertamina sebagai perusahaan nasional beberapa kali kalah tender dengan perusahaan asing, sehingga sebagian besar kini pengelolaan minyak bumi dipegang oleh perusahaan asing atau MNC milik Amerika Serikat yang

[80]"Dibawah UU Migas No 22 tahun 2001 wilayah kerja migas lebih banyak dimenangkan perusahaan nasional", www.esdm.go.id, 13 September 2014
[81]Salim, Agus , "Ada Apa dengan UU Migas", www.esdm.go.id, 13 September 2014
[82]Ibid
[83]"Selamatkan Sektor Migas Indonesia", www.theglobal-review.com, 1 Oktober 2014
[84]"Tobing,Eldo", Analisa Ekonomi politik Bantuan Luar negeri Amerika Serikat di Indonesia, www.academia.edu, 2 Oktober 2014

mengakibatkan pemerintah kehilangan sejumlah besar pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan liberalisasi sektor migas ini, Indonesia memang mendapatkan keuntungan dari para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Namun karena adanya liberalisasi undang-undang sektor migas ini, Indonesia semakin kekurangan cadangan minyak dalam negeri. Akibatnya Indonesia yang sebelumnya adalah negara pengimpor minyak, kini menyebabkan Indonesia sangat bergantung kepada negara pengimpor minyak terutama Amerika.Sektor migas merupakan salah satu aset vital bagi negara. Pengelolaan sumber daya alam ini jika dikelola dengan baik oleh para sumber daya manusia negara itu sendiri, dapat menyumbang kekayaan serta pemasukan bagi negara. Begitu pun dengan Indonesia, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, jika dikelola dengan baik oleh para sumber daya manusia itu sendiri, tidak dapat dipungkiri Indonesia mampu bersaing dengan perekonomian negara lain. Tapi jika kenyataannya yang sekarang adalah bahwa aset vital milik bangsa ini dikelola dan dimanfaatkan demi memenuhi kepentingan negara maju lain. Indonesia akan sulit untuk membangun ekonomi dengan menggunakan dana yang dapat ia hasilkan dari sektor migas ini. Pembangunan ekonomi di Indonesia semakin terhambat, akibatnya Indonesia terus membutuhkan aliran bantuan dari Amerika Serikat, begitu seterusnya hingga rantai ketergantungan ekonomi ini sulit untuk diputusan.

Analisa ini sesuai dengan teori dependensia yang telah diungkapkan oleh Paul Baran dengan menjelaskan bahwa negara maju melalui MNC telah mengambil alih perekonomian yang ada di negara berkembang dan terus mengeruk sumber daya alam yang ada di negara berkembang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-

dunia ketiga sangat bergantung dengan negara maju dalam hal pengembangan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur negara.

c. Dampak pengaruh Privatisasi BUMN yang di agendakan oleh USAID terhadap Ekonomi Indonesia.

Membangun ekonomi yang stabil di negara berkembang tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalah keuangan telah menjadi masalah utama yang paling rumit begi negara-negara berkembang dewasa ini. Upaya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan menjadi fokus utama pemerintah untuk menghindari perekonomian dari krisis. Karena krisis keuangan memiliki implikasi yang luas dan menyebar di berbagai sektor.

Pemberian bantuan luar negeri dari negara maju melalui lembaga internasional, seperti IMF dan USAID, baik berupa hutang luar negeri, ataupun bantuan murni, telah melahirkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap sumber finansial dari negara maju ini. Ketergantungan negara berkembang ini, membuat ekonomi mereka semakin mudah untuk di intervensi dan dikelola demi memenuhi kepentingan negara asing.

Inilah fenomena yang menimpa Indonesia, Indonesia tidak lagi hidup dari pajak maupun pendapatan yang dibayarkan oleh rakyatnya. Namun dari hutang serta bantuan luar negeri dari negara-negara maju. Pemberian bantuan luar negeri oleh USAID, juga semakin membuat Indonesia terperosok ke dalam permainan kebijakan

Di awal telah dijelaskan awal mula sejarah ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dimulai dari peminjaman hutang luar negeri kepada IMF. Paska peminjaman hutang luar negeri tersebut, Indonesia harus mengikuti syarat yang di tetapkan oleh IMF menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat liberal. Secara tidak sadar, akibat dari menerapkan kebijakan yang di tentukan oleh IMF, ekonomi Indonesia semakin bergantung kepada Amerika Serikat.dominasi Amerika Serikat di kancah perpolitikan Indonesia juga semakin besar.

Ketergantungan Indonesia atas Amerika Serikat inipun semakin bertambah melalui penerimaan bantuan luar negeri yang diberikan USAID untuk Indonesia.USAID telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Namun pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh USAID juga tidak dapat dilepaskan demi memenuhi kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat.

Bahkan sesuai dengan program kerja USAID, yang tertuang pada strategic plan for Indonesia tahun 2008, USAID mengagendakan liberalisasi ekonomi untuk Indonesia[85]. Agenda ini termasuk memprivatisasi BUMN di Indonesia.BUMN merupakan aset penting milik negara yang seharusnya dapat secara maksimal dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Namun ketika aset penting milik negara tersebut diambil alih oleh asing, serta aset penting dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dikelola demi pemenuhan kepentingan asing, hal ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam ketergantungan ekonomi kepada negara maju, dan hal ini menyebabkan keterlambatan pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia.

[85] "Penguasa Mengkhianati rakyat", www.hizbut-tahrir.or.id, 5 Nopember 2014

Gangguan yang terjadi di sektor ekonomi di Indonesia akan melahirkan sesuatu yang negatif seperti, instabilitas keuangan, kerugian negara serta menghambat pemenuhan hajat hidup orang banyak. Program kerja USAID untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia, salah satunya adalah privatisasi BUMN, telah menjembatani Amerika Serikat untuk mengeruk laba yang besar dengan memanfaatkan kelemahan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dengan adanya liberalisasi ekonomi yang dicanangkan oleh USAID ini, struktur ekonomi negara Indonesia sebagian besar dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan hampir 87% perusahaan serta investasi asing Amerika Serikat merajalela di Indonesia[86]. Dan sebagian besar APBN dikuasai oleh 300 orang kelompok borjuasi ekonomi, dimana sebagian besar dari mereka adalah ekspatriat asing. Hal ini mengakibatkan angka pengangguran semakin besar. Serta sumber daya manusia yang berkualitas yang seharusnya mengelola aset penting milik negara tersebut, justru harus bekerja demi kepentingan asing, dan bukan demi kepentingan bangsa ini.

B. Implikasi Hegemoni Amerika Serikat terhadap politik Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Secara sederhana demokrasi merupakan sebuah tatanan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Artinya siapapun yang memerintah atau pemegang kekuasaan harus mendapat mandate dari mereka yang diperintah atau dikuasai[87]. Prinsipnya meskipun pada dasarnya kedaulatan ditangan rakyat, tetapi mengingat tidak mungkin seluruh rakyat

[86] "Borjuasi Ekonomi Indonesia era reformasi", www.academia.edu, 9 November 2014

ambil bagian dalam menjalankan pemerintahan. Maka diperlukan lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.

Disini lah letak akar konflik terjadi, terkadang rekruitmen dan seleksi politik sering digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan suatu elit politik yang berlindung mengatasnamakan rakyat. Pilar utama demokrasi yang penting adalah institusi dan lembaga politik[88]. Dimana demokrasi dapat berjalan dengan baik, ketika suatu lembaga politik yang dibentuk oleh suatu negara tersebut, dapat memberikan jaminan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, memberikan peluang dan keleluasaan partisipasi masyarakat dengan kebebasan yang dijamin untuk menyalurkan dan mengekspresikan aspirasi, dan jaminan perlindungan dari ancaman penguasa yang membatasi kebebasan individu.

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dilakukan oleh mayoritas parpol yang memenangkan pemilihan umum. Namun harus diingat, mayoritas tersebut diperoleh melalui pemiliham umum yang adil, jujur, serta regular. Implikasi politik yang diakibatkan oleh Amerika Serikat melalui USAID yaitu tatanan demokrasi Indonesia yang cenderung berkiblat memenuhi kepentingan politik Amerika Serikat. Melalui USAID, Amerika Serikat berusaha untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan politik di Indonesia. Cara pertamanya nya adalah dengan membiayai kampanye pemilu partai tertentu yang memiliki niatan untuk menjalin kerjasama dengan USAID. Para elite politik yang kampanye nya dibiayai oleh USAID biasanya membuat perjanjian jika ia terpilih untuk menduduki kursi pemerintahan di lembaga negara. Akibatnya secara tidak langsung ia menjadi kaki tangan USAID untuk melancarkan rumusan kebijakan yang USAID harapkan demi memenuhi kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat.

Dengan ini ekspansi asing Amerika Serikat masuk ke dalam lembaga politik Indonesia, kemudian mempunyai andil dalam perumusan kebijakan ekonomi dan politik yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Amerika Serikat melalui USAID, juga membangun institusi-institusi yang mempromosikan kerjasama ekonomi dan keamanan. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia merasa bahwa Amerika Serikat merupakan partner dan mitra politik yang baik. Sehingga Amerika Serikat bisa mendapatkan kepercayaan dari Indonesia untuk menjalin kerjasama dan selalu dapat menerima saran serta ide-ide yang diberikan oleh Amerika Serikat di dalam perumusan suatu kebijakan negara. Hal ini melahirkan ketergantungan Indonesia kepada Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan politik di Indonesia.

Bantuan luar negeri yang diberikan USAID kepada Indonesia dikaitkan dengan keutuhan rezim Amerika Serikat, agar Indonesia selau mendukung berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebagai negara super power. Bantuan luar negeri Amerika Serikat melalu USAID dapat mendominasi kekuatan politik termasuk dalam investasi yang Amerika Serikat tanamkan di Indonesia dan menyusup hingga kepada pembuatan keputusan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan domestiknya.

USAID langsung berada di bawah pemerintah Amerika Serikat. Tidak peduli apakah pemerintah Amerika Serikat saat ini dikuasai oleh partai demokrat atau partai republik, USAID akan tetap eksis karena USAID merupakan senjata bagi Amerika Serikat dalam menyalurkan bantuan dana bagi negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Dengan bantuan tersebut Amerika Serikat mampu mendikte secara politis negara yang menerima bantuan tersebut. Dalam hal ini adalah Indonesia.

Bantuan Amerika Serikat di Indonesia ada dua jenis. Pertama yang sifatnya government to government, yakni bantuan dari pemerintah ke pemerintah. Bantuan ini cenderung bersifat langsung. Karena menyangkut hubungan diplomatis. Contoh

kasusnya adalah saat pemerintah memberikan bantuan dana untuk perbaikan jembatan yang rusak di Aceh akibat bencana alam tsunami. USAID memberikan dana yang nilainya hampir mencapai 2 triliun[89].

Selain government to government, USAID juga mempunyai kebijakan membantun pembangunan masyarakat di Indonesia, contohnya dalam program pembangunan perdamaian, pemberdayaan ekonomi, penguatan pemerintah, dan lain-lain. Untuk program yang sifatnya langsung kepada keefektifan manfaat, maka USAID biasanya kerap menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga NGO lokal dan nasional. Contohnya untuk kasus aceh, USAID banyak mengeluarkan dana terkait dengan program perdamaian, pemberdayaan, demokrasi dan sebagainya. Mereka yang mengucurkan dana, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh NGO-NGO lokal nasional atau lokal.

USAID bersedia membantu Indonesia baik government to government, maupun bantuan yang melalui perantara NGO lokal, karena jelas tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan bantuan yang USAID berikan melalui NGO lokal yang berada di suatu daerah, maka USAID dapat memperkuat jaringan ke daerah tersebut. Akses USAID untuk mendapatkan informasi tentang kondisi politik di daerah itu semakin mudah. Sehingga Informasi ini akan menjadi alat bargaining bagi pemerintah Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan di Indonesia. Amerika Serikat selalu berusaha memaksimalkan perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Karena dengan adanya sistem demokrasi yang baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik sehingga diplomasi Amerika Serikat pun akan berjalan dengan baik di sana. Inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia. Berbagai jenis bantuan serta diplomasi

[89] "Komentar Amerika Serikat melalui program dukungan bagi pemerintah lokal di aceh pasca tsunami

yang ditawarkan oleh Amerika Serikat sebenarnya merupakan sebuah bentuk pendekatan untuk mendikte serta mendominasi perumusan kebijakan politik di Indonesia agar dapat memenuhi kepentingan politik Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia terkesan bergantung kepada Amerika Serikat, baik dalam memecahkan isu politik dalam negeri, maupun dalam perumusan kebijakan politik demi kepentingan negara. Amerika Serikat seperti menjadi kiblat dan acuan bagi keputusan politik Indonesia.

C. Implikasi Hegemoni Amerika Serikat terhadap kedaulatan geografis dan psikis Indonesia

Negara tanpa kedaulatan adalah negara yang lemah. Negara seperti ini cenderung tidak memiliki ketegasan, berpotensi untuk mengatur hal tidak penting, namun tidak memiliki otoritas efektif dalam mengatur hal-hal esensial yang menentukan hajat hidup orang banyak. Inilah yang dapat terjadi jika Indonesia tidak berusaha melepaskan ketergantungan nya dari hegemoni negara super power ini. Hegemoni Amerika di Indonesia yang ditanamkan melalui penyaluran bantuan luar negeri dari USAID ini dapat dikatakan mengancam, karena paham Amerika yang menganut liberalisme hal ini erat kaitannya dengan imperialism yang tentunya memiliki pengaruh besar dalam kehancuran kedaulatan negara Indonesia.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, membuat Amerika enggan melepaskan kekuasaannya di Indonesia. Dengan penyaluran bantuan luar negeri melalui USAID kepada Indonesia melahirkan dominasi Amerika Serikat yang besar kepada Indonesia. Realitas hegemoni kebijakan ekonomi politik Amerika Serikat melalui USAID ini, cenderung memiskinkan rakyat Indonesia. Beban pembayaran

hutang serta dampak kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat neoliberal menyebabkan angka kemiskinan semakin besar.

Pemiskinan ini didorong oleh ketergantungan dan hegemoni Amerika yang dikondisikan dalam sistem kebijakan negara yang tidak lagi pro terhadap rakyat. Peran Indonesia sebagai negara, beralih menjadi hanya sekedar fasilitator dan tidak lagi sebagai regulator yang melindungi kepentingan rakyat. Dominasi Amerika Serikat terhadap kedaulatan Indonesia juga terlihat dari besarnya konsen Amerika Serikat terhadap perumusan kebijakan di dua kawasan strategis yang berlimpah sumber daya alamnya seperti Aceh dan Papua. Contoh kasus yang lain sebagai bukti Amerika Serikat yang telah mempengaruhi kedaulatan di Indonesia adalah, ketika kongres Amerika Serikat meminta agar presiden membeabaskan dua tokoh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), hal ini menunjukkan bagaimana kuatnya intervensi Amerika Serikat di dalam mencampuri urusan dalam negeri di Indonesia. Ini juga terlihat dari bagaimana pemerintah Amerika Serikat di bawah kepresidenan Barrack Obama memberi dukungan kepada semua elemen yang pro terhadap pemisahan papua barat dari Indonesia[90]. Jika melihat dari kasus ini, campur tangan Amerika Serikat di dalam urusan dalam negeri Indonesia sudah cukup mendalam. Campur tangan Amerika Serikat atas kasus Papua ini diindikasikan sebagai cara untuk mempertahankan kepentingan Amerika Serikat di papua tersebut, terutama dalam pengelolaan tambang dan emas.

Contoh terakhir adalah pengadaan unit penelitian medis angkatan laut AS yang disebut dengan Namru. Keberlangsungan Namru di Indonesia melahirkan polemik, karena telah dinyatakan oleh menteri kesehatan, bahwa proyek Namru sama sekali tidak bermanfaat dan harus dihentikan. Akan tetapi Namru tetap saja berdiri

[90] "Amerika Mainkan Politik dua kaki di Papua", theglobal-review.com, 15 November 2014

tegak. Pemerintah Amerika Serikat bahkan meminta kekebalan diplomatic bagi 20 staf nya guna memasuki seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Namru bukan bagian dari kegiatan diplomasi. Yang jelas, pemberhentian Namru terkesan sulit dan berlarut-larut[91]. Hal ini semakin menguatkan bahwa pemerintah terkesan tunduk dengan kekuatan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia harus menentukan sikap. Agar tidak menjadi negara lemah yang mudah diekspansi oleh Amerika Serikat.